



Program Kampung Iklim sebagai Media Penguatan Nilai Gotong Royong dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Diki Okdiansyah¹ Iim Siti Masyitoh² Vini Agustiani Hadian³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}
Email: dikiokdiansyah123@gmail.com¹ iim.sitimasyitoh@upi.edu² viniaugustiani87@upi.edu³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan Program Kampung Iklim sebagai wujud penguatan nilai gotong royong dalam pendidikan kewarganegaraan berwawasan lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, dengan key informan meliputi pegawai Dinas Lingkungan Hidup, pengurus kegiatan, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim memberikan dampak nyata dalam memperbaiki lingkungan melalui langkah adaptasi dan mitigasi bencana, seperti pengendalian kekeringan dan banjir, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit berbasis iklim, pengelolaan sampah, serta penggunaan energi terbarukan. Lebih dari itu, pelaksanaan program ini terbukti mampu menumbuhkan dan memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian dari karakter civic responsibility (tanggung jawab warga negara).

Kata Kunci: Program Kampung Iklim, Masyarakat, Lingkungan

Abstract

This study aims to examine the series of activities within the Climate Village Program (Program Kampung Iklim) as a manifestation of strengthening gotong royong values in environmentally-oriented civic education. The method used in this study is a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and literature review. Research subjects were determined through purposive sampling, with key informants comprising employees of the Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup), program administrators, and community leaders. Data analysis was conducted through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the Climate Village Program has had a significant impact on environmental improvement through adaptation and disaster mitigation measures, such as drought and flood control, food security enhancement, climate-based disease management, waste management, and the use of renewable energy. Furthermore, the implementation of this program has proven effective in fostering and strengthening gotong royong values as part of civic responsibility character among community members.

Keywords: Climate Village Program, Community, Environment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perwujudan kelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Sehingga manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Dalam kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Namun dewasa ini, kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak langsung pada kualitas hidup manusia sekaligus melemahkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Perubahan iklim memberikan dampak yang luar biasa pada kelangsungan hidup miliaran manusia. Bumi yang semakin panas membuat lapisan

salju meleleh, menaikkan permukaan air laut, menguatkan dan memperseringnya datangnya topan, curah hujan, serta memperparah penyebaran penyakit (William, 2007). Banyaknya dampak perubahan iklim merupakan sebuah realitas yang telah dirasakan secara luas di berbagai belahan dunia, sehingga diperlukan aksi nyata untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata telah menghilangkan hubungan manusia dengan alam, dari yang seharusnya intim menjadi hubungan materialistik yang mengakibatkan krisis ekologi (Triyanto dan Rima, 2018). Kondisi ini sekaligus mengikis semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan bersama.

Terdapat dua hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim. Pertama, mitigasi yakni upaya mengurangi atau mencegah dampak perubahan iklim. Kedua, adaptasi yakni penyesuaian yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan iklim yang telah terjadi (Muhajir dan Steni, 2010). Kedua upaya ini sejatinya tidak dapat berjalan tanpa adanya partisipasi aktif dan kolektif dari masyarakat, yang dalam konteks budaya Indonesia tercermin melalui nilai gotong royong sebagai wujud nyata tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*). Penjelasan umum dalam UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurhayati (2016) yang menyatakan bahwa seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan, laju kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat membuat keserasian lingkungan yang dibangun masyarakat selama puluhan tahun mulai terganggu.

Berbagai upaya dalam menyadarkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan terus diupayakan sebagai langkah terciptanya lingkungan yang berkualitas. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari karakter warga negara yang bertanggung jawab (*good citizen*). Salah satu bentuk nyata pendidikan kewarganegaraan berwawasan lingkungan di tingkat komunitas adalah melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2010 Pasal 3, Program Kampung Iklim adalah rangkaian program yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Program ini dapat dilaksanakan pada wilayah setingkat Dusun/Dukuh/RW hingga maksimal setingkat Desa/Kelurahan. Program Kampung Iklim tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai media penguatan nilai gotong royong dalam masyarakat. Melalui kegiatan kolektif seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penanggulangan bencana, masyarakat secara bersama-sama menginternalisasi nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji pelaksanaan Program Kampung Iklim di RW 07 Cibunut Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dengan tujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan Program Kampung Iklim sebagai wujud penguatan nilai gotong royong dalam Pendidikan Kewarganegaraan berwawasan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Penentuan lokasi penelitian dilakukan di RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Di lingkungan ini, masyarakat setempat

melaksanakan Program Kampung Iklim sebagai upaya adaptasi dan mitigasi bencana sekaligus sebagai wujud penguatan nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, dengan *key informan* penelitian meliputi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pengurus kegiatan Program Kampung Iklim, serta tokoh masyarakat di RW 07 Cibunut. Adapun analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bagian tata lingkungan, Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program yang berjalan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Masuknya ProKlim di wilayah RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung diawali adanya embrio-embrio yang mendukung ProKlim. Sebelumnya, wilayah tersebut telah mengelola berbagai kegiatan berbasis lingkungan, seperti kawasan bebas sampah, program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), dan kampung berwarna. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal guna meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)." (Wawancara, 6 Maret 2026).

Berjalannya ProKlim di RW 07 Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung tentu saja tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Respon positif dari warga mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Kesadaran tersebut tidak muncul secara individual, melainkan tumbuh dan berkembang melalui semangat gotong royong sebagai nilai budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi aktif warga dalam kegiatan ProKlim merupakan wujud nyata dari *civic responsibility* yakni tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan dan sesama. Etika peduli lingkungan yang dilakukan warga RW 07 Cibunut bukan terbentuk secara langsung, melainkan melalui proses yang berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan yang diterima dan dijalankan bersama di masyarakat. Kegiatan seperti kawasan bebas sampah, program Kang Pisman, dan kampung berwarna menjadi wahana internalisasi nilai gotong royong secara praktis dan kontekstual. Pola pikir masyarakat yang terbentuk atas informasi dan pengalaman bersama melahirkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap individu sekaligus tanggung jawab kolektif sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung melakukan beberapa upaya dalam menciptakan dan mengembangkan ProKlim di wilayahnya. DLH membuat kampung percontohan Program Kampung Iklim yang sebelumnya didahului dengan survei lapangan untuk mengetahui kampung yang memenuhi kriteria dan cocok dijadikan sebagai lokasi ProKlim. Setelah proses seleksi tersebut, DLH melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan warga agar semakin peduli terhadap lingkungan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dalam menjalankan setiap kegiatan ProKlim secara bersama-sama. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu warga RW 07 Cibunut. "Pembinaan dan pemberdayaan telah didapatkan masyarakat, kami mendapat bantuan berupa pembinaan terkait pengelolaan sampah seperti pupuk komposter, dan dilakukan pembinaan terkait pembuatan biopori, resapan di kampung kami, serta pemilahan sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut kami lakukan bersama-sama sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami terhadap lingkungan sekitar" (Wawancara, 4 Maret 2026).

Kondisi ini memberikan dampak berupa bertambahnya pengalaman dan penerimaan informasi baru di kalangan warga RW 07 Cibunut yang nantinya akan membentuk sikap kepedulian terhadap lingkungan sebagai objek bersama. Proses pembentukan sikap tersebut tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang dilandasi semangat gotong royong dalam setiap kegiatan ProKlim. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Priadi (2018) bahwa kepemilikan dan pemberdayaan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku kewarganegaraan lingkungan (*environmental citizenship behavior*) terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui ProKlim secara langsung berkontribusi pada penguatan karakter warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim RW 07 Cibunut, dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, penanganan kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin dan gelombang tinggi, pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, pengolahan dan pemanfaatan air limbah, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim). Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolektif oleh warga sebagai cerminan nilai gotong royong yang menjadi roh dari pelaksanaan ProKlim sekaligus wujud nyata pendidikan kewarganegaraan berwawasan lingkungan hidup. "Warga di RW 07 Cibunut ini melakukan beberapa kegiatan rutin, salah satunya adalah bank sampah yang dilaksanakan setiap minggu pertama. Ibu-ibu dan bapak-bapak di sini membawa sampah non organik seperti kardus, botol plastik, bungkus plastik, dan lain-lain untuk dikumpulkan dan ditimbang, kemudian dijual ke pengepul. Hasil penjualan sampah tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada warga setahun sekali, yaitu menjelang Lebaran." (Wawancara, pengurus ProKlim RW 07 Cibunut, 2026).

Kondisi ini merupakan salah satu upaya nyata dalam mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di lingkungan RW 07 Cibunut. Kegiatan bank sampah yang dilaksanakan secara rutin dan kolektif oleh warga menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran lingkungan berbasis gotong royong. Hal ini sejalan dengan pendapat Made (2018) yang menyatakan bahwa bank sampah merupakan kegiatan yang mengajarkan *social engineering*, yakni mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran dalam pengelolaan sampah secara bijak, yang pada akhirnya akan mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah melalui bank sampah di RW 07 Cibunut terbukti memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, sebagaimana tercermin dari hasil penjualan sampah non organik yang dibagikan kepada warga setiap menjelang Lebaran. Lebih dari sekadar nilai ekonomi, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ini telah berkembang menjadi budaya baru di masyarakat yang dilandasi semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

"Setiap bulannya pengumpulan sampah non organik di RW 07 Cibunut bisa mencapai 800 kg hingga hampir 1 ton. Sedangkan untuk sampah organik akan dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Selain itu, warga di sini juga aktif melakukan penanaman melalui urban farming sebagai upaya pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan perkotaan." (Wawancara, warga RW 07 Cibunut, 2026). Memanfaatkan lahan yang terbatas menjadi tempat bercocok tanam merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh warga RW 07 Cibunut sebagai upaya menyiasati keterbatasan lahan di lingkungan perkotaan. Melalui kegiatan *urban farming*, warga secara bersama-sama memanfaatkan setiap sudut lahan yang tersedia untuk ditanami pohon

buah dan sayuran. Kondisi ini dikemukakan oleh salah satu warga RW 07 Cibunut: "Warga di sini melakukan penanaman dengan konsep urban farming menggunakan berbagai media tanam yang disesuaikan dengan kondisi lahan kami yang terbatas. Rumah dan pekarangan kami memang tidak luas, namun dengan semangat bersama kami tetap bisa memanfaatkan setiap lahan yang ada untuk bercocok tanam." (Wawancara, warga RW 07 Cibunut, 2026). Masyarakat RW 07 Cibunut cenderung mengonsumsi hasil tanam sendiri, sehingga memungkinkan warga untuk menghindari kebiasaan konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu warga RW 07 Cibunut: "Kami semua di sini menanam tanaman sayur yang nantinya akan digunakan untuk konsumsi warga sendiri. Kegiatan ini kami lakukan bersama-sama karena hasilnya juga untuk kepentingan bersama." (Wawancara, warga RW 07 Cibunut, 2026).

Jika dikaitkan dengan pendapat Made (2018), masyarakat dapat melakukan intensifikasi lahan untuk menanam tanaman dengan pemanfaatan lahan terbuka disekitar rumah. Maka sebenarnya lahan terbatas bukanlah menjadi masalah penting dalam melakukan kegiatan bercocok tanam tetapi mau atau tidaknya seseorang dalam melakukannya. Dari hasil penelitian masyarakat RW 07 Cibunut melakukan pengelolaan sampah untuk dijadikan produk hasil yang berguna. "Kampung kami membuat pupuk kompos dan pupuk cair organik. Pembuatan pupuk kompos dilakukan secara mandiri oleh warga desa, dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga dalam menanam tanaman sayur. Sebagian warga juga menjual bibit tanaman, media tanam dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang dengan harga yang terjangkau, sehingga mudah dijangkau oleh sesama warga. Selain itu, warga seringkali diikutsertakan dalam pameran-pameran tanaman organik sebagai bentuk partisipasi bersama." (Keterangan warga RW 07 Cibunut) Kondisi dan situasi lingkungan di daerah tersebut menjadi faktor pendorong bagi setiap warga untuk bekerja sama satu sama lain. Permasalahan dalam pengelolaan sampah mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, sehingga peran aktif masyarakat menciptakan sinergitas antara berbagai pihak (Gunawati, 2016). Masyarakat secara kreatif mengelola limbah menjadi produk bernilai jual yang mampu menghasilkan pemasukan, mengubah tumpukan sampah menjadi produk jadi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan Gusmadi (2018) bahwa pendekatan pendidikan kemasyarakatan merupakan salah satu pendekatan yang memandang pentingnya masyarakat menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu warga berinisial HS, yang memberikan keterangan mengenai dampak yang dirasakan dengan adanya Program Kampung Iklim (Proklam) di RW 07 Cibunut. Berdasarkan keterangannya, terdapat sejumlah dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, di antaranya: penghijauan yang dilakukan secara bersama-sama membuat udara di sekitar kampung menjadi lebih sejuk, terbentuknya sistem resapan air yang mengalirkan air menuju sungai terdekat, serta melimpahnya ketersediaan sumber air bersih bagi warga. Antusiasme warga terhadap kegiatan Proklam sangat tinggi karena dampaknya dirasakan nyata, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh HS: "Kampung kami sekarang sejuk. Sebelumnya tidak ada penghijauan, namun kini warga banyak yang menanam lingkungan rumahnya dengan pohon, sayur, dan buah. Dahulu di sini pernah terjadi kekeringan, namun kini sumber air melimpah berkat penggunaan air yang bijak oleh warga dan penampungan air hujan. Pembuatan resapan air juga dialirkan langsung ke sungai terdekat sehingga kampung kami tidak mengalami bencana banjir." (Keterangan HS, salah satu warga RW 07 Cibunut).

Civic responsibility atau tanggung jawab warga negara merupakan kesadaran dan kewajiban individu, komunitas, maupun organisasi untuk mempertimbangkan hak dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan bersama (Kadir, 2018). Perilaku masyarakat saat ini turut menentukan kualitas lingkungan, masyarakat yang menyadari bahwa lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan akan senantiasa berupaya untuk menjaga dan melestarikannya. Dari kesadaran inilah terbentuk rasa tanggung jawab pada setiap individu yang terlibat, sehingga pada akhirnya hak masyarakat atas tempat tinggal yang baik dan layak dapat terpenuhi secara bersama-sama. Hal ini dipertegas oleh Baehaqi dan Siti (2016) yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dalam konteks personal mendorong cara berpikir warga negara yang kritis dan sistematis, serta peka terhadap penyelesaian masalah secara bertanggung jawab demi melindungi lingkungan kehidupan masyarakat.

Pemerintah turut memberikan bantuan bibit tanaman yang selanjutnya dikembangkan oleh warga di lingkungan sekitar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim. Hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam memberikan pengetahuan kepada warga mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Proklam berjalan sebagaimana mestinya. Warga mempraktikkan cara-cara yang telah disosialisasikan oleh DLH, sehingga yang semula tidak memiliki pengetahuan kini memahami dan mampu menerapkannya secara mandiri. Hal ini selaras dengan pendapat Carlson (2011) yang menyatakan bahwa praktik terbaik dalam pendidikan lingkungan hidup adalah melalui pengalaman lapangan secara langsung. Kegiatan masyarakat dalam membuat produk kompos untuk keperluan pertanian juga sejalan dengan hasil penelitian Dwi dan Suryono (2018), bahwa perilaku *civic responsibility* yang ditampakkan dan diwujudkan mencakup: 1) tidak melakukan *illegal logging* terhadap hutan, 2) bertani secara organik, dan 3) menggunakan sumber mata air alami secara bijak.

Sebagai salah satu kegiatan yang membina masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan, Program Kampung Iklim yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di RW 07 Cibunut mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan, sehingga tantangan perubahan iklim dapat diatasi secara bersama-sama. Hal ini dibuktikan dengan relevansi Proklam sebagai wahana pendidikan lingkungan hidup, yakni melalui upaya adaptasi dan mitigasi bencana yang tercermin dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh warga. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Samya dan Danial (2016) yang menyatakan bahwa kebajikan kewarganegaraan tidak hanya dibina di sekolah, melainkan dapat pula dilakukan di masyarakat maupun komunitas, dengan tujuan akhir tidak sekadar menjadikan warga negara yang baik dan cerdas, tetapi juga sebagai respons terhadap tuntutan perubahan zaman demi mewujudkan kewarganegaraan multidimensional.

Selain itu, keterampilan warga negara dalam mengelola lingkungan secara baik menjadi bekal penting bagi partisipasi warga dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Syahrir (2013), solusi agar warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah melalui pembekalan *knowledge*, *skill*, dan *disposition*. Lebih lanjut, PPKn mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan sesama warga negara maupun alam sekitarnya (Yunianto, 2016). Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Proklam di RW 07 Cibunut telah menjadi salah satu bentuk nyata pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, karena melalui kegiatan tersebut telah terbentuk perilaku warga negara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, selaras dengan nilai gotong royong yang menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat.

Menurut hasil penelitian Kadir (2019), tingkat rasa ingin tahu tentang lingkungan secara signifikan mempengaruhi dimensi keberlanjutan, tanggung jawab, hak, dan keadilan dalam

konteks *civic responsibility* warga negara. Lebih lanjut, ditemukan bahwa frekuensi partisipasi dalam kegiatan lingkungan secara langsung mempengaruhi seluruh dimensi tanggung jawab kewarganegaraan tersebut. Kegiatan warga dalam mensukseskan Proklamasi telah sejalan dengan isi pendidikan kewarganegaraan yang berwawasan lingkungan, sebagaimana dijelaskan bahwa isi pendidikan kewarganegaraan mengembangkan: (1) nilai-nilai cinta tanah air, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, (4) nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, (5) kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta (6) kemampuan awal bela negara (Budimansyah dalam Winarno, 2010).

Masyarakat menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan; kondisi lingkungan yang semakin hari semakin kompleks menuntut keterlibatan semua pihak secara aktif di dalamnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan Proklamasi dapat terinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara, sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkan lingkungan sekitar yang layak huni demi terpenuhinya hak masyarakat atas tempat tinggal yang baik dan layak. Dengan dilaksanakannya Proklamasi sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, warga didorong untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pandangan Rezekiningsih (2015) bahwa pendidikan kewarganegaraan menekankan upaya terbentuknya warga negara yang lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, serta mampu mengambil keputusan bagi dirinya, lingkungan, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Program Kampung Iklim (Proklamasi) adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal guna meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Di RW 07 Cibunut, kegiatan yang dilaksanakan warga secara bersama-sama meliputi: pelaksanaan bank sampah setiap bulan, pembuatan media tanam *polybag*, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, bercocok tanam dengan sistem hidroponik, penampungan air hujan, serta pembuatan resapan air. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara gotong royong sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama warga terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak yang dirasakan dari adanya Proklamasi di wilayah RW 07 Cibunut antara lain: penghijauan yang dilakukan secara kolektif membuat udara di sekitar kampung menjadi lebih sejuk, terbentuknya sistem resapan air yang mengalirkan air menuju sungai terdekat, serta melimpahnya ketersediaan sumber air bersih bagi warga. Selain memberikan manfaat lingkungan, produk yang dihasilkan juga memiliki nilai ekonomis, di antaranya pupuk kompos organik, media tanam *polybag*, dan bibit tanaman yang dipasarkan melalui keikutsertaan warga dalam berbagai pameran. Kegiatan Proklamasi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan terselenggaranya Proklamasi, masyarakat semakin menyadari pentingnya lingkungan yang sehat sebagai bagian dari kehidupan yang baik. Tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya merupakan langkah nyata dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal dan kehidupan yang layak, selaras dengan nilai gotong royong yang menjadi ruh Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Baehaqi, D., & Siti, S. (2016). Kewarganegaraan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, dan Peran PPKn. *Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan*



- sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bartkiene, A., Bikauskaite, R., dkk. (2018). Ecological Citizenship: Habitus of Care in the Public Sphere. *Journal Institute of Philosophy Vilnius University Universiteto*, Vol. 93.
- Burroughs, W. (2007). *Climate Change: A Multidisciplinary Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carlson. (2011). Validating an Environmental Education Field Day Observation Tool. *International Electronic Journal of Environmental Education*, Vol. 1, Issue 3.
- Dwi, I., & Suryono, H. (2018). Ecological Citizenship pada Masyarakat Kampung Naga untuk Membangun Karakter Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional PPKn: Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan*. Lab PPKn FKIP UNS.
- Gunawati, D. (2016). *Membumikan Konsep Lingkungan Hidup Berkelanjutan dalam Konteks Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Telaah Konteks dan Konten*. Surakarta: Kekata Store.
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1.
- Kadir, K. (2018). Ecological Citizenship Scale Development Study. *International Electronic Journal of Environmental Education*, Vol. 8, No. 2, pp. 82–104.
- Kadir, K. (2019). Model Review Related to the Effects of Teachers' Levels of Ecological Citizenship. *International Electronic Journal of Environmental Education*, Vol. 9, Edisi 1. Aksaray Universitesi, Egitim Fakultesi, Ilkogretim Bolumu, Kampus, Aksaray 68100, Turkey.
- Made, P. (2018). *Membangun Masyarakat Peduli terhadap Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Muhajir, M., & Steni, B. (2010). Hukum Perubahan Iklim dan REDD. *Prosiding Pelatihan Kerangka Hukum dan Kebijakan Perubahan Iklim, Khususnya REDD dari Perspektif Hak Masyarakat dan Keberlanjutan Hutan*. Jakarta: Huma, pp. 17.
- Nurhayati, W. (2016). Pembinaan Kesadaran Warga Negara untuk Melestarikan Lingkungan Hidup (*The Living Environment*) pada Masyarakat Adat. *Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010.
- Priadi, A., Erian, F., dkk. (2018). Environmental Citizenship Behavior (The Effect of Environmental Sensitivity, Knowledge of Ecology, Personal Investment in Environmental Issue, Locus of Control towards Students' Environmental Citizenship Behavior). *Journal Published EDP Sciences*, Vol. 74. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rezekiningsih, T. (2015). Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengaktualisasikan Moralitas Penegakan Hukum untuk Membentuk *Good Citizen*. *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PPKn*. Lab PPKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Samya, R., & Danial, E. (2016). Pengembangan Nilai Kepedulian Warga Negara melalui Gerakan Peduli Lingkungan. *Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syahri, M. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep *Green Moral* di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13, No. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia.



- Triyanto & Vien, R. P. (2018). Perempuan dan Gerakan Lingkungan: Pengalaman Perempuan Masyarakat Adat Menjaga Alam. *Prosiding Seminar Nasional PPKn: Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan*. Lab PPKn FKIP UNS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Winarno. (2013). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yuniarto, C. (2016). Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Dasar dan Menengah. *Proceeding International Seminar Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan*. Universitas Pendidikan Indonesia.